



# **Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pemersatu Bangsa**

**Jaleswari Pramodhawardani  
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan**

**Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023**



# PERAN PENTING JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)



Bentuk tanggung jawab pemerintah atas perluasan penyebaran pengetahuan hukum ini salah satunya diemban melalui JDIHN, yang merupakan wadah bersama atas pendayagunaan dokumen hukum.

Substansi JDIHN memiliki dalam merevitalisasi iklim hukum di Indonesia :

JDIHN berisikan Putusan pengadilan dan yurisprudensi yang dapat mendukung iklim Indonesia sebagai negara hukum.

Monografi dan artikel hukum untuk memahami norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

JDIHN tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, termasuk juga produk hukum selain peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

Putusan pengadilan

Yurisprudensi

Monografi hukum

Artikel majalah hukum

Buku Hukum

Penelitian Hukum

Pengkajian Hukum

Naskah Akademis

Rancangan peraturan perundang-undangan





Dalam rangka menguatkan JDIHN ke depan, salah satu perspektif yang dapat menjadi titik refleksi adalah perspektif komparatif. Beberapa negara memiliki *best practice* di bidang dokumentasi dan informasi hukum.



1. Terdapat fitur *Understanding Legislation* yang membuat para pengakses mengetahui bagaimana proses undang-undang
2. Terdapat fitur *type* yang mengatur strata peraturan undang-undang.
3. Terdapat fitur *help* yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait penggunaan *website*.



1. Legal *database Attorney General's Department (AGD)* mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Australia
2. Legal *database AGD* memiliki berbagai fitur *support* yang memudahkan pengguna untuk mencari dan memahami informasi hukum.
3. Legal *database AGD* dikelola oleh tim ahli hukum dari AGD, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya akurat dan dapat diandalkan.



1. *Federal Register (FR)* menerbitkan peraturan, pengumuman, dan informasi lain yang dikeluarkan oleh semua badan pemerintah federal, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. FR Diperbarui setiap hari kerja dan berisi informasi terbaru dari pemerintah federal.



“Saya ingin menegaskan kembali bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi, pembenahan aspek prosedur. Untuk itu saya minta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini.”

“Saya juga berharap dilakukan penataan *database* peraturan perundang-undangan, manfaatkan sistem informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan pelayanan elektronik regulasi atau *e-regulasi*”

Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, 17 Januari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta



**Perluasan Akses Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Terjemahan Resmi**



**Optimalisasi Fungsi Pendayagunaan Dokumen Hukum di luar Peraturan Perundang-Undangan**



**Peningkatan Fungsi Sarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum bagi Masyarakat**



**Peningkatan Fungsi JDIHN Sebagai Payung Tunggal Bagi Seluruh Dokumen Hukum**





TERIMA KASIH

KANTOR STAF PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Bina Graha  
Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia